

PELAKSANAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

Wasiah Sufi dan Mayarni

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). This study aims to determine the implementation of RSBI aimed at improving the quality of education for international kejenjang Elementary School 006 West Chart and determine the factors that influence the implementation of international school pilot program at West Elementary School District 006 Chart Bangko Rokan Hilir. This research uses Model W. N Dunn as a model of analysis and the type of research uses descriptive qualitative method. Based on the evaluation of the implementation of the Pilot program at International School West Elementary School District 006 Chart Bangko Rokan Hilir basically not running as it should be as minimal operating costs, low human resources, and the lack of existing infrastructure. This coupled with the lack of guidance and supervision of the local government.

Abstrak: Pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program RSBI yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan kejenjang bertaraf internasional bagi Sekolah Dasar Negeri 006 Bagan Barat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rintisan sekolah bertaraf internasional di SD Negeri 006 Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan Model W. N Dunn sebagai model analisis dan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SD Negeri 006 Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya belum berjalan sebagaimana mestinya seperti minimnya biaya operasional, sumberdaya manusia yang masih rendah, dan terbatasnya sarana prasarana yang ada. Hal ini ditambah dengan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, mutu pendidikan, dan RSBI.

PENDAHULUAN

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan dari suatu bangsa, sebagai wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula serta progresif dalam membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikianlah yang menjadi investasi besar dalam perjuangan untuk keluar dari krisis dan menghadapi tantangan global.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat disebabkan karena minimnya anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional dibanding dengan sektor lainnya. Selain keterbatasan dana yang tersedia juga masih kurangnya perhatian dari sebagian orang terhadap sektor pendidikan, kendati faktor pendidikan mempunyai peran

penting untuk memajukan suatu Negara, karena dengan pendidikan yang baik dan maju dapat mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan menunjang sektor-sektor lainnya.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, dan hal itu pula yang menjadi alasan dari para orang tua yang kurang perhatian pendidikan anak-anaknya. Tidak tersedianya dana yang cukup untuk biaya sekolah serta adanya anggapan bahwa biaya sekolah masih tergolong mahal bagi sebagian besar.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam upaya memajukan pendidikan di daerahnya. Salah satunya adalah dengan menggalakkan sekolah unggulan atau yang terkenal dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dinas

Pendidikan Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor: 632/KPTS/KEP/2009 telah menunjuk dan menetapkan SD Negeri 006 Bagan Barat Kecamatan Bangko sebagai Sekolah Berwawasan Keunggulan menuju Rintisan Bertaraf Internasional.

Banyak syarat yang harus dipenuhi menjadi RSBI. Luas lahan minimal 20.000 M² dan ditambah dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal yang melebihi sekolah-sekolah pada umumnya. Sementara untuk memenuhi standar minimal saja belum dapat terpenuhi, sebagai ujung tombak pendidikan adalah Standar Kualifikasi Pendidikan Guru harus S1 dan menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

Dari 40 orang guru, 20 orang telah memenuhi syarat pendidikan S1 sedangkan 18 orang belum memenuhi standar kualifikasi akademik guru. Dari data di atas kepala sekolah belum memenuhi standar RSBI, dimana persyaratan yang harus dipenuhi harus S2. Mestinya begitu ditunjuk menjadi sekolah RSBI, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya penempatan guru yang berkualitas disekolah tersebut.

Untuk memenuhi standar guru tersebut, guru-guru telah melakukan upaya diantaranya kuliah S1 melalui Universitas Terbuka dan kuliah di Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri dan sedikit sekali yang mendapat subsidi, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah sehingga target yang diharapkan belum terpenuhi. Sementara kewenangan masalah rekrut dan penempatan serta pembinaan guru dan tenaga pendidik merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Penunjukan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi sekolah, sebab penunjukan itu tidak didasarkan pada studi kelayakan yang ketat dan akurat yang merujuk pada standar yang harus dipenuhi oleh RSBI. Sebagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan RSBI, sebagaimana dalam panduan penyelenggaraan, yaitu beberapa syarat sudah terpenuhi namun ada yang belum terpenuhi.

Kemudian lokasi tempat dimana sekolah tersebut berdiri kurang strategis sehingga ber-

pengaruh kepada minat pendidik maupun peserta didik. Seharusnya lokasinya berada pada pusat kota serta memiliki lahan minimal 2 Ha serta mudah dijangkau oleh masyarakat diberbagai daerah. Sementara letak sekolah tersebut tidak memenuhi standar.

Penunjukan sekolah tersebut telah memasuki tahun keempat mestinya standar kualifikasi akademik guru dan standar kompetensi guru sudah terpenuhi. Kenyataan di lapangan masih ada guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Disisi lain pemerintah juga belum memenuhi kewajibannya mewujudkan sekolah bertaraf internasional di Kabupaten Rohil. Seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah kongkret untuk menempatkan guru-guru berprestasi atau cakap pada sebuah sekolah tersebut atau mendirikan sekolah tersebut secara terpisah dilokasi baru serta persiapan tenaga pendidik yang handal. Kunci keberhasilan terletak pada kualitas guru dalam proses pengelolaan pembelajaran serta didukung dari Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Perusahaan disekitar Sekolah dan Dukungan dari masyarakat.

Program rintisan sekolah dasar bertaraf internasional merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya yang telah dilaksanakan selama ini. Program diarahkan pada peningkatan mutu pendidik dan terdidik yang pada akhirnya berguna bagi pengembangan kemajuan kegiatan pendidikan untuk mewujudkan kemandirian sekolah untuk menuju tingkat internasional. Pelaksanaan dilakukan langsung oleh dinas Pendidikan, dibantu seluruh elemen sekolah yang berkaitan. Oleh karena itu, peranan aparat pemerintah sangat penting, dan harus ditunjang oleh partisipasi seluruh elemen sekolah. Keberhasilan program RSBI akan bergantung pada tiga elemen, yakni: (1) pemahaman tentang seluk beluk kelompok sasaran yang hendak dituju oleh program, (2) kesesuaian antara tujuan program dengan hakekat permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, dan (3) pemilihan instrumen atau paket program yang paling cocok serta ketersediaan prasarana dan sarana penunjangnya. Tetapi, ketiga elemen

ini belum menjamin keberhasilan suatu program, melainkan baru merupakan syarat perlu. Dalam kasus RSBI, untuk betul-betul menjamin keberhasilan program masih diperlukan beberapa persyaratan lain seperti kapabilitas sistem organisasi pelaksanaan, sistem informasi, dan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program RSBI yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan ke jenjang bertaraf internasional bagi Sekolah Dasar Negeri 006 Bagan Barat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rintisan sekolah bertaraf internasional di SD Negeri 006 Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, serta mengacu kepada desain deskriptif kualitatif unit-unit yang diteliti meliputi masyarakat dan kelembagaan sosial, maka yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, Humas; Koordinator Pelaksana Program, Guru, Tata Usaha, Bendahara, Laboran, Pustakawan, Teknisi, dan Siswa. Peneliti cenderung memilih informan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat serta mengetahui masalahnya secara mendalam.

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Pelaksanaan Standar RSBI

Penulis melakukan evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (1994) dengan hasil sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas dari kebijakan program RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat belum tercapai. Hal ini dikarenakan kebijak tersebut tidak tepat pada tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan program ini belum tercapai atau belum sempurna dengan adanya indikasi bahwa pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam program ini belum dapat bekerja sama dengan baik dan belum memahami fungsinya masing-masing, sehingga program ini terkesan hanya sekedar ada atau tidaknya program. Untuk tercapainya keberhasilan program RSBI ini harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi yang terkait. Selain ini diperlukan sosialisasi mengenai program RSBI ini agar mengetahui dan memahami kebijakan ini.

2. Efisiensi

Biaya yang dihabiskan untuk penerapan kebijakan RSBI di Sekolah Dasar Negeri 006 Bagan Barat Kabupaten Rokan Hilir cukup besar. Karena untuk meningkatkan mutu sekolah harus banyak melakukan perubahan-perubahan, mulai dari kelengkapan sarana prasarana pendidikan. Seperti kelengkapan buku pegangan murid, kelengkapan media pembelajaran dan kompetensi guru. Dalam pelaksanaan ini bisa menghabiskan biaya sekitar Rp.100.000.000 pertahun, tetapi pada kenyataannya biaya tersebut belum pernah dikucurkan dari pemerintah daerah setempat. Maka dari itu, sekolah mengambil kebijakan untuk melakukan pungutan bagi setiap siswa masing-masing dikenakan biaya sekitar Rp. 60.000.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti waktu yang digunakan untuk penerapan kebijakan Program RSBI di Sekolah Dasar Negeri 006 Bagan Barat Kabupaten Rokan Hilir cukup lama. Program ini sudah tiga tahun dan dengan lamanya waktu yang digunakan untuk pelaksanaan program ini, hasilnya tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tetap belum tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Tenaga yang terpakai untuk penerapan kebijakan Program RSBI di SD Negeri 006 Bagan

Barat di Kabupaten Rokan Hilir masih kurang. Mulai dari sosialisasi program hingga pengawasan dan pelaksanaan. Pada tahap pengawasan tenaga (sumber daya manusia) yang digunakan oleh instansi yang terkait. Sehingga peraturan ini tidak efektif mengatasi masalah yang ada. Jika dilihat dari ketiga sub indikator diatas, yaitu biaya, waktu dan tenaga belum maksimal diberikan dalam penerapan kebijakan, sehingga tingkat efektifitas kebijakan RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat masi sangat rendah, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efisien.

3. Kecukupan

Kinerja pelaksanaan kebijakan RSBI masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keadaan sekolah, dimana masih banyak yang belum terpenuhi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pembuat atau pelaksana kebijakan) terhadap penerapan kebijakan masih tidak maksimal.

4. Pemerataan

Pemerataan distribusi manfaat dari kebijakan RSBI belum cukup merata. Hal ini dapat dilihat dari kinerja instansi yang terkait dalam hal ini yaitu kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah beserta seluruh peserta didik dalam membangun dan meningkatkan mutu sekolah.

5. Responsivitas

Respon masyarakat atau elemen sekolah terhadap kebijakan program rintisan sekolah bertaraf internasional belum terpuaskan kebutuhannya. Hal ini disebabkan oleh sarana prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum mencukupi dalam pelaksanaan program RSBI ini.

Jadi, karena respon masyarakat terhadap kebijakan ini masih belum puas, maka kriteria responsivitas tidak dapat terpenuhi. Kebijakan program RSBI tidak dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. Ketepatan

Kebijakan RSBI belum tepat. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan SD Negeri 006 Bagan Barat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Dapat dilihat dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syarat dari RSBI itu sendiri. Disini pemerintah hanya menunjuk Sekolah sebagai RSBI melihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sekolah dan melihat tingkat kelulusan siswanya, tidak didasarkan pada studi kelayakan yang ketat dan akurat yang merujuk pada standar yang harus dipenuhi oleh RSBI. Dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 006 Bgan Barat benar belum siap ditunjuk sebagai RSBI dan perlu dilakukan pembinaan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Faktor yang menjadi kendala Pelaksanaan kebijakan Program RSBI

Dalam proses penelitian ini ditemukan berbagai kendala dalam upaya pelaksanaan program RSBI diantaranya:

1. Komunikasi

Pada pelaksanaan Program RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat terjadi komunikasi yang kurang baik, dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, sehingga masyarakat urang memahami tentang keberadaan program RSBI tersebut. Disamping itu partisipasi masyarakat rendah karena kondisi perekonomian yang relatif rendah sehingga sulit untuk membantu berjalannya program sekolah.

2. Sumber daya

Pada pelaksanaan kebijakan program RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat sumber daya yang ada kurang memadai untuk melakukan proses pembelajaran bertaraf internasional, seperti kurang tersedianya guru-guru yang profesional dan menguasai Bahasa Inggris, disamping itu kurangnya biaya untuk melengkapi sarana prasarana yang belum memenuhi standar RSBI. Sebaiknya sebelum adanya program atau bersamaan program sekolah rintisan bertaraf internasional dilaksanakan disiapkan tenaga profesional dengan cara mutasi guru-guru atau

pengangkatan baru sehingga sumber daya yang diharapkan dapat dibina seiring dengan pembinaan sekolah tersebut dengan harapan tercapainya sekolah yang benar-benar berkualitas dan mampu menyesuaikan dengan sekolah bertaraf internasional.

3. Disposisi

Pada pelaksanaan kebijakan Program RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat, sikap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan bahwa tingkat komitmen kurang objektif dalam proses penunjukan/ seleksi sekolah yang benar-benar menyentuh berbagai pihak, sehingga hasil yang diharapkan kurang memuaskan. Menunjuk sekolah berdasarkan kriteria antara memenuhi syarat dengan kurang memenuhi syarat sulit dibedakan sehingga telah berjalan dua tahun mengalami berbagai hambatan terutama dukungan pemerintah daerah sampai saat ini belum sepenuhnya memberikan respon yang berarti demi kemajuan sekolah rintisan bertaraf internasional yang dimaksud.

4. Struktur birokrasi

Proses penentuan sekolah yang memenuhi standar untuk dijadikan sekolah bertaraf internasional masih syarat dengan unsur kedekatan dan unsur kepentingan sehingga kurang mendapat respon atau persetujuan dari pihak dan instansi lainnya, akibatnya lambat berkembang. Dalam urusan pegawai atau guru merupakan wewenang pemerintah kabupaten, sedangkan program RSBI merupakan program pusat yang dilimpahkan ke Provinsi, untuk itu perlu koordinasi yang dinamis antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga ketika dibutuhkan guru oleh pihak sekolah pemerintah kabupaten langsung mengalokasikannya. Akibatnya pengangkatan guru tidak merata dan tidak dapat memenuhi standar kualifikasi pada RSBI. Disamping itu pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah seharusnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kecamatan agar kebutuhan pegawai khu-

susnya guru benar-benar terealisasi sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan, kedekatan dan kepentingan lainnya.

Tingkat Ketercapaian Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional pada Pelaksanaan RSBI

Implementasi dari peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga implementasinya belum bisa mencapai kesesuaian dengan peraturan. Dari beberapa penjelasan di atas, implementasi dari berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional belum sepenuhnya dapat terealisasi. Misalnya, tentang bantuan pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa mereka harus membantu program tersebut dalam pengadaan sarana dan prasarana, pendanaan biaya operasional dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya pemerintah telah menghentikan pemberian bantuan pembiayaan sebelum waktu yang telah ditetapkan.

Bantuan dari pemerintah pusat itu sebesar 50%, pemerintah provinsi 30% dan pemerintah kabupaten/kota 20%. Tetapi pada kenyataannya, pemerintah pusat sampai saat ini bantuan tersebut belum ada. Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah hanya ada pada tahun pertama RSBI di SD N 006 Bagan Barat tersebut ada. Sehingga dana yang telah diberikan oleh pemerintah tidak bisa mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang bisa menunjang pembelajaran secara global dan proses perawatannya yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarananya belum terlaksana, misalnya sekolah yang belum berfasilitas ICT, LCD dan komputer di masing-masing kelas, serta pengadaan loker, meja dan kursi yang tidak sesuai dengan standarnya.

Melihat dari definisi normatif dan EFA (Education For All), berdasarkan hasil observasi ke SD Negeri 006 Bagan Barat, sekolah ini belum termasuk kedalam kategori RSBI yang bersifat normatif dan EFA (education For all)

karena dari 8 standar kompetensi ada peraturan yang belum sesuai atau belum terlaksana oleh SD Negeri 006 Bagan Barat. Salah satu standar kompetensi yang belum sesuai atau belum terlaksana yaitu standar penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana dan standar lainnya yang masih diupayakan.

Kemudian, apabila dilihat dari segi tujuan bahwa pendidikan itu harus bersifat untuk semua orang, maka Sistem RSBI belum memenuhi aspek tersebut, sekolah yang notabene menerapkan sistem SBI cenderung hanya dapat dirasakan oleh beberapa golongan dan orang saja, sekolah SBI di beberapa kota cukup mahal dan kurang terjangkau bagi kalangan yang kurang mampu, sehingga muncul anggapan bahwa hanya orang yang memiliki uang saja yang dapat merasakan sekolah dengan sistem SBI. Saat ini sistem SBI telah mengupayakan beberapa program seperti pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, namun hal ini belum dirasakan efektif dan menjangkau semua kalangan di masyarakat.

SIMPULAN

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Program RSBI di SD Negeri 006 Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan hilir pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dari tujuan dan sasaran Program RSBI belum tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelak-

san kebijakan program RSBI adalah faktor kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya manusia yang produktif, disposisi yang belum baik, dan struktur birokrasi yang belum efisien serta minimnya biaya operasional. Tingkat ketercapaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaan Program RSBI belum tercapai hal ini dapat dilihat dari beberapa Standar Nasional masih banyak yang belum terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin, 1990. *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Dunn, William, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Rian, Nugroho, 2009, *Public Policy, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi, Arikunto, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Yogyakarta: Balairung & Co.